

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA ANTAR PADA SISTEM CASH ON DELIVERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI OLEH PENJUAL

Oleh :

Rohman Maulana Yanuar, Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum, dan Moh.
Anwar, S.H., M.M., M.H.

Pada zaman saat ini semua kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah dengan beberapa sarana berupa metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), namun metode ini menimbulkan banyak sekali tindakan wanprestasi dari pihak yang terlibat pada perjanjian jual-beli ini. Pada prakteknya metode ini mengakibatkan pihak jasa antar (kurir) yang selalu dirugikan dengan pihak konsumen atau pembeli tidak memenuhi prestasinya. Sehingga metode ini masih dipertanyakan akan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang terjadi.

Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat terutama pada pihak konsumen melalui sistem COD. Dan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap, lembaga, masyarakat, pendidikan dan pemerintahan.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang mengkaji atau memfokuskan pada suatu norma peraturan perundang-undangan, dengan Pendekatan Perundang-Undangan atau Statue Approach dan Pendekatan Konsep atau Conceptual Approach dan juga bahan hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat telah diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimana konsumen atau pembeli harus menyelesaikan perjanjian atau prestasi dengan membayar harga sesuai dengan barang yang di perjanjikan dan nantinya perjanjian jual beli dengan metode *Cash On Delivery* ini dapat ditemukan kejelasan penyelesaiannya, bagaimana bentuk hubungan hukum pihak yang terlibat dan bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila wanprestasi terjadi.

Kata Kunci : *Cash On Delivery*, Hubungan Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST DELIVERY SERVICE BUSINESS IN THE CASH ON DELIVERY SYSTEM IN THE EVENT OF Default BY THE SELLER

By :

Rohman Maulana Yanuar, Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum, dan Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

In today's era, all online buying and selling activities are also facilitated by several means in the form of a COD (*Cash On Delivery*) payment method, but this method causes a lot of default actions from the parties involved in this sale and purchase agreement. In practice, this method results in the delivery service (courier) who is always at a disadvantage with the consumer or buyer not fulfilling their performance. So that this method is still questionable about how the form of legal protection against defaults that occur.

Of course, this study aims to find out how the settlement and forms of legal protection against defaults are carried out by several parties involved, especially on the consumer side through the COD system. And later it can provide several benefits both theoretically and practically to, institutions, society, education and government.

In this research, the writer uses normative juridical research. Normative juridical research that examines or focuses on a statutory norm, with the Legislative Approach or the Statue Approach and the Conceptual Approach and also legal materials in the form of the Commercial Code (KUHD), Book II, Chapter V-A on Transportation of Goods, Consumer Protection Law Number 8 of 1999, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

The results of this study indicate that default actions and legal protection for several parties involved have been regulated through the Commercial Code (KUHD), Book II, Chapter V-A concerning the Transport of Goods, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. , and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions by paying a price according to the goods in the agreement and later the sale and purchase agreement with the Cash On Delivery method can be found clear about the settlement, how the form of the legal relationship between the parties involved and how the form of legal protection will take if a default occurs

Keywords: *Cash On Delivery*, Legal Relations, Default